

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

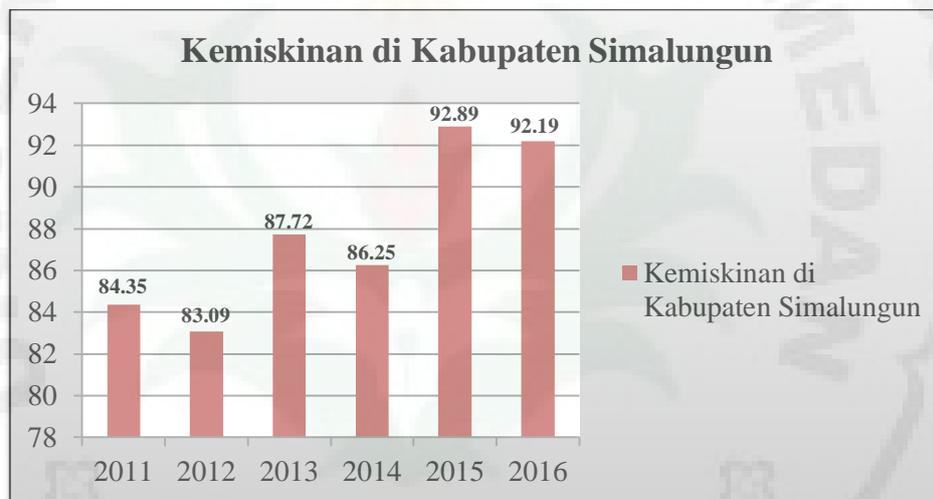
Kemiskinan pada hakekatnya merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak umat manusia ada. Kemiskinan merupakan persoalan kompleks dan tampaknya akan terus menjadi persoalan aktual dari masa ke masa. Meskipun sampai saat ini belum ditemukan suatu rumusan maupun formula penanganan kemiskinan yang dianggap paling jitu dan sempurna, penemu konsep dan strategi penanganan kemiskinan harus terus-menerus diupayakan (Suharto dalam Sjafari, 2014).

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah semua negara atau daerah. Hal ini disebabkan karena kondisi kemiskinan di suatu negara atau daerah merupakan salah satu cerminan tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin banyak penduduk miskin di suatu wilayah maka semakin tidak sejahtera wilayah tersebut, sebaliknya semakin sedikit jumlah dan persentase penduduk miskinnya maka hal tersebut mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan kesejahteraan penduduknya (Leasuwal, 2013).

Kabupaten Simalungun merupakan salah satu daerah yang tercatat memiliki jumlah penduduk miskin yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data (BPS, 2013) 54% penduduk di Kabupaten Simalungun bermata pencaharian bercocok tanam. Namun pekerjaan ini belum dapat mensejahterahkan rakyat karena penghasilan dari bercocok tanam belum mampu memenuhi

kebutuhan hidup masyarakat. Disamping itu, mahalanya harga-harga bahan baku untuk bercocok tanam seperti; pupuk, bibit dan lain sebagainya menyebabkan masyarakat semakin tidak mampu untuk terus bercocok tanam. Berikut ini merupakan grafik Kemiskinan di Kabupaten Simalungun tercatat dari tahun 2011 s/d tahun 2016.

Grafik 1.1. Grafik Kemiskinan di Kabupaten Simalungun Tahun 2011 s/d Tahun 2016 Dalam (000)



Sumber : Data BPS Kabupaten Simalungun

Berdasarkan grafik Kemiskinan di Kabupaten Simalungun terlihat pada tahun 2013 dan pada tahun 2015 kemiskinan meningkat. Penyebab kemiskinan adalah karena minimnya ketersediaan lapangan kerja sehingga menimbulkan banyaknya pengangguran. Tidak hanya itu, masih rendahnya tingkat pendidikan, dan belum meratanya pembangunan di setiap daerah juga menjadi faktor penyebab tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Simalungun (*newsanalisisdaily, 2017 dalam topik Tiga Penyebab Kemiskinan*).

Pemerintah daerah diharapkan menciptakan lapangan kerja baru yang bisa menyerap banyak tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran. “Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang *entrepreneur*. Ini salah satu upaya

menciptakan lapangan kerja. Kemudian sosialisasi kepada angkatan kerja yang usianya masih muda, sehingga timbul *entrepreneur* muda yang menciptakan lapangan kerja kedepannya. Dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan, pemerintah telah melakukan berbagai macam program pemberdayaan. Hal tersebut juga turut melibatkan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), kelompok peduli, dunia pendidikan, dunia usaha dan pihak-pihak lain juga turut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Humam 2012 dalam Kurniawan, dkk 2014).

Salah satu keseriusan pemerintah ditunjukkan dengan adanya berbagai macam program pemberdayaan melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yaitu usaha yang sinergi antara pemerintah dengan pihak-pihak lain sangat dibutuhkan untuk efektivitas program pemberdayaan. Oleh karena itu, bagi sebagian orang yang memiliki potensi dari segi kreativitas, inovatif, teliti, ulet, dan memiliki kemampuan kerja yang tinggi, justru hal tersebut yang menarik untuk mendirikan UMKM. Hal tersebut dikarenakan merasa lebih bebas, tidak terkekang untuk mengambil keputusan, tidak memikirkan resiko yang tinggi, dan mereka menyadari bahwa suatu usaha besar harus dimulai dari usaha kecil. Selain itu, kemampuannya lebih baik dan dinamis dalam menyesuaikan diri terhadap keadaan pasar yang mudah berubah dibandingkan usaha besar.

Dalam struktur perekonomian Indonesia, UMKM merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang produktif, yang keberadaanya mendominasi dalam struktur perekonomian nasional. Jika dicermati lebih mendalam keberadaan UMKM cukup dilematis. Di satu sisi keberadaanya dianggap sebagai penolong karena lebih mampu bertahan di masa krisis ekonomi serta menjadi tumpuan harapan

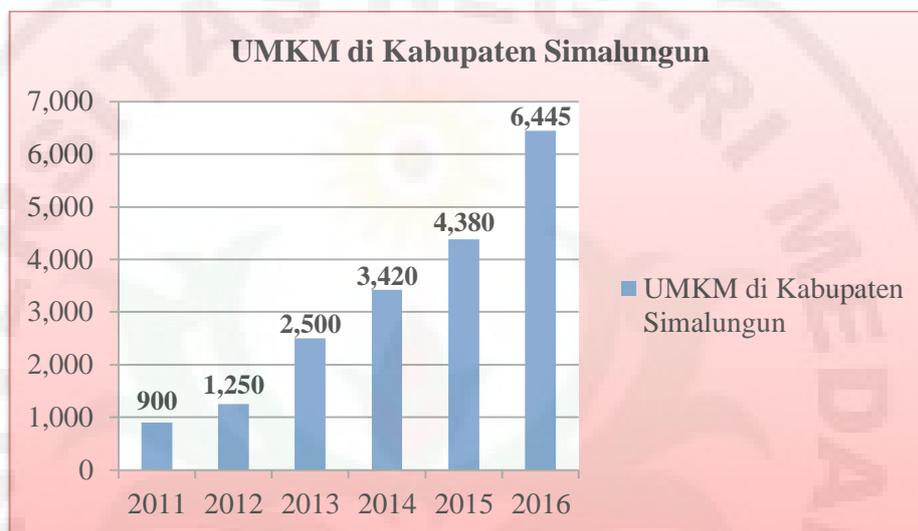
masyarakat, karena keberadaannya mampu banyak menyediakan kesempatan kerja, mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan serta motor penggerak pembangunan nasional dan daerah. Di sisi lain, keberadaannya juga masih banyak menghadapi kendala dan keterbatasan baik secara internal maupun eksternal (Prasetyo 2008).

Di Indonesia pentingnya UMKM sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial seperti tingkat penduduk miskin yang tinggi dan jumlah pengangguran yang besar terutama dari golongan masyarakat berpendidikan rendah, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Peran keberadaan UMKM yang paling menonjol adalah kemampuan dalam penyerapan tenaga kerja dapat mengurangi jumlah pengangguran (Nurjanah, 2015).

Penanggulangan kemiskinan dengan cara mengembangkan UMKM memiliki potensi yang cukup baik, karena ternyata sektor UMKM memiliki kontribusi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Peranan strategis sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yakni kemampuan sektor ini menjadi pilar utama ekonomi Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS 2005), jumlah UMKM mencapai 42,39 juta unit atau sekitar 99,85% dari total unit usaha di Indonesia dan mampu menyerap lebih kurang 99,45% tenaga kerja di Indonesia. Upaya untuk memajukan dan mengembangkan sektor UMKM akan dapat menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja yang ada dan tentu saja akan dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang terlibat di dalamnya sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Dan pada akhirnya akan dapat digunakan untuk pengentasan kemiskinan (Supriyanto 2006). Berikut ini

merupakan Grafik UMKM di Kabupaten Simalungun tercatat dari tahun 2011 s/d tahun 2016.

Grafik 1.2. Grafik UMKM di Kabupaten Simalungun Tahun 2011 s/d tahun 2016



Sumber : Data Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Simalungun

Berdasarkan grafik diatas, jelas terlihat bahwa keberadaan UMKM mengalami peningkatan setiap tahunnya di Kabupaten Simalungun. UMKM merupakan salah satu program Pemerintah untuk mengentaskan Kemiskinan, dengan harapan dengan adanya hadirnya UMKM, maka kemiskinan akan tuntas. Oleh karena itu, perlu dilihat seberapa besarkah keberadaan UMKM di Kabupaten Simalungun mampu menyerap tenaga kerja dengan tingkat pendidikan nonformal dan berperan dalam mengentaskan kemiskinan mengingat semakin berkembangnya UMKM dari tahun ketahun.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Pengaruh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Penyerapan Tenaga Kerja dan Tingkat Pendidikan Nonformal dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Simalungun”.

1.2. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh UMKM dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Simalungun?
2. Bagaimana pengaruh penyerapan tenaga kerja dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Simalungun?
3. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan nonformal dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Simalungun?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh UMKM dan pentingnya keberadaan UMKM sebagai salah satu upaya mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Simalungun.
2. Untuk mengetahui pengaruh penyerapan tenaga kerja dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Simalungun.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan nonformal dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Simalungun.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah untuk mendukung keberadaan UMKM agar dapat menyerap Tenaga Kerja dan juga didukung dengan berbagai pendidikan nonformal dari pemerintah. Sehingga dapat membantu mengentaskan kemiskinan.
2. Bagi pelaku UMKM dapat memberikan pertimbangan tentang keberadaan para pelaku usaha sebagai salah satu pengentasan kemiskinan dan menjadi penggerak perekonomian di Kabupaten Simalungun.
3. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang akan mengadakan kajian lebih lanjut mengenai pentingnya keberadaan UMKM, penyerapan tenaga kerja dan tingkat pendidikan nonformal dalam mengentaskan kemiskinan.